

DAFTAR PUSTAKA

- [BPKP] Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2016. *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- [BPKD] Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. 2018. Kabupaten Pesisir Selatan.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2017. Pesisir Selatan dalam Angka 2017. BPS Kabupaten Pesisir Selatan.
- Baharim, Samsul. 2017. Studi Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna. [Skripsi]. Kendari: Universitas Halu Oleo.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- _____. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Erwin. 2001. *Dinamika Pengorganisasian Jaminan Sosial dalam Keluarga pada Masyarakat Petani di Pedesaan Minangkabau*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hanif, Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Universitas Diponegoro: Semarang.
- <http://www.pnri.go.id/Pedoman-Perbaikan-Pedoman-Penyusunan-Pelaporan-Akuntabilitas-Kinerja-instansi-Pemerintah.pdf>. diakses pada tanggal 3 Juli 2018 pukul 10.10 WIB.
- Kurnia, Dadang. 2015. *Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: "Sosialisasi Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa"*. Jakarta: BPKP
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mamuaya, Jeacklin Valenia. 2017. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolang Manondow Selatan. [Skripsi]. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Manulang, M. 1988. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi 1*. Yogyakarta: BBPE.
- Mamesa, DJ. 1995. *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

- Mardiasmo. 2006. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)*. Surabaya: STIESIA Surabaya.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mondale, dkk. 2017. Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Aceh Tengah. [Jurnal]. Aceh. Universitas Syiah Kuala.
- Nafidah, Lina Nasehatun. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. [Jurnal]. Jakarta. Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Nazir, M. 2009. *Metoda Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana kepada Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2015.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Pradhana, Herybertus Yudha. 2018. Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo. [Skripsi]. Yogyakarta. Universitas Santa Dharma.
- Simamora, Sihar. 2014. Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Terhadap Belanja Daerah. [Jurnal]. Sumatera Utara. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sumarna, Ayi. 2015. Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa. [Artikel] diakses tanggal 8 Februari 2019 <https://www.keuangandesa.info/2015/11/pokok-pokok-pengelolaan-keuangan-desa.html>.

Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Aceh: The World Bank.

Tijtoherijanto, Prijono. 2001. *Proyeksi Penduduk, Angkatan Kerja, Tenaga Kerja, dan Peran Serikat Pekerja dalam Peningkatan Kesejahteraan*. Majalah Perencanaan Pembangunan. Edisi 23.

Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

Wasistiono dan Tahir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Press.

